



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)

DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH

2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini secara umum menggambarkan pencapaian kinerja instansi dan sekaligus merupakan bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, serta sebagai salah satu wujud pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dan juga sebagai implementasi dari ketentuan yang termuat dalam Inpres Nomor 7 tahun 1979 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan ini memuat beberapa aspek, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017 a/d 2022, Perubahan awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, capaian kinerja dan beberapa kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam pemecahan permasalahan. Berbagai informasi yang dimuat disajikan secara kuantitatif maupun kualitatif, informasi ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja unit kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh beserta sub unit kerja Sekretariat dan bidang-bidangnya sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam aspek-aspek apa saja yang masih menjadi kendala sehingga pencapaian hasil kinerja di masa mendatang dapat dioptimalkan.

Akhir kata, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat hendaknya dan sesuai dengan harapan.

Payakumbuh, Januari 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH**



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) ini merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perubahan Renstra 2017-2022. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, hasil analisis capaian dari 6 (enam) indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis perubahan Tahun 2017-2022, ternyata telah menunjukkan kinerja yang baik.

Pada tahun 2022, target Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada setiap indikator kinerja dapat direalisasikan 100%, bahkan melebihi target. Sementara itu, realisasi kinerja tahun 2022 pada masing-masing indikator kinerja pada umumnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021.

Dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut, kinerja kegiatan-kegiatan dengan dana APBD yang dilaksanakan pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	12
2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	23
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis	26
C. Akuntabilitas Keuangan	78
BAB IV PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Perbandingan Ketersediaan Pangan Untuk dikonsumsi Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022	6
TABEL 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Perangkat Daerah.....	14
TABEL 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2022	15
TABEL 2.3 Perjanjian Kinerja.....	18
TABEL 2.4 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	21
TABEL 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	27
TABEL 3.2 Pencapaian Target Sasaran.....	28
TABEL 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran 1	30
TABEL 3.4 Skor Pola Harapan (Skor PPH) Tingkat Ketersediaan.....	31
TABEL 3.5 Capaian Kinerja Indikator Skor PPH Ketersediaan.....	33
TABEL 3.6 Skor PPH Tahun 2017-2022	34
TABEL 3.7 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Keberagaman Ketersediaan Pangan	38
TABEL 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 2	40
TABEL 3.9 Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Konsumsi	43
TABEL 3.10 Capaian Kinerja Indikator Skor PPH Konsumsi Tahun 2018-2022.....	45
TABEL 3.11 Konsumsi Pangan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2022.....	46
TABEL 3.12 Perkembangan Capaian Konsumsi Energi dan Protein Perkelompok..... Pangan Tahun 2020 s/d 2022	49
TABEL 3.13 Hasil Uji Residu Pestisida pada sampel sayuran dan buah.....	52
TABEL 3.14 Hasil Uji Kandungan Formalin.....	54
TABEL 3.15 Capaian Kinerja Indikator Tingkat Keamanan Pangan tahun 2017-2022.....	55
TABEL 3.16 Tingkat Efektifitas dan efisiensi kinerja meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat Yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.....	58
TABEL 3.17 Analisis Pencapaian Sasaran 3.....	60
TABEL 3.18 Gambaran gejolak harga bahan pangan pokok dan koefisien variasi (CV) Tingkat Konsumen Tahun 2022.....	63
TABEL 3.19 Gambaran gejolak harga cabe merah dan CV Tingkat Konsumen Tahun 2022.....	65
TABEL 3.20 Gambaran gejolak harga bawang merah dan CV Tingkat Konsumen Tahun 2022.....	67
TABEL 3.21 Data Pasokan Penyediaan Pangan di Kota Payakumbuh tahun 2021-2022 ..	71
TABEL 3.22 Tingkat Efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran meningkatnya kelancaran distribusi Pangan.....	73
TABEL 3.23 Analisis Pencapaian Sasaran 4	74
TABEL 3.24 16 Tingkat Efektifitas dan efisiensi kinerja meningkatnya akuntabilitas..... Kinerja perangkat daerah.....	77
TABEL 3.25 Pagu dan Realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2022.....	79
TABEL 3.22 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2022.....	82

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Perbandingan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022	7
GAMBAR 3.1 Ketersediaan energi untuk dikonsumsi penduduk Kota Payakumbuh Menurut kelompok bahan pangan Tahun 2022	36
GAMBAR 3.2 Perkembangan Harga beras kualitas I di tingkat Konsumen	64
GAMBAR 3.3 Perkembangan Harga Cabe Merah di tingkat Konsumen	66
GAMBAR 3.4 Perkembangan Harga Bawang Merah di Tingkat Konsumen.....	69

`BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman Kepemerintahan yang baik (Good Governance) mulai mengemuka seiring setelah munculnya krisis multidimensi di negeri ini dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat sehingga menuntut agar pemerintah menyelenggarakan pemerintah secara baik. Untuk mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut tentunya, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, karena untuk membangun good governance bukan semata-mata masalah memperbaiki institusi pemerintah, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi dari pelaku-pelaku dalam masyarakat. Koordinasi yang baik, integrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari semua pihak sangat diperlukan guna mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. Tugas dan Fungsi

1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

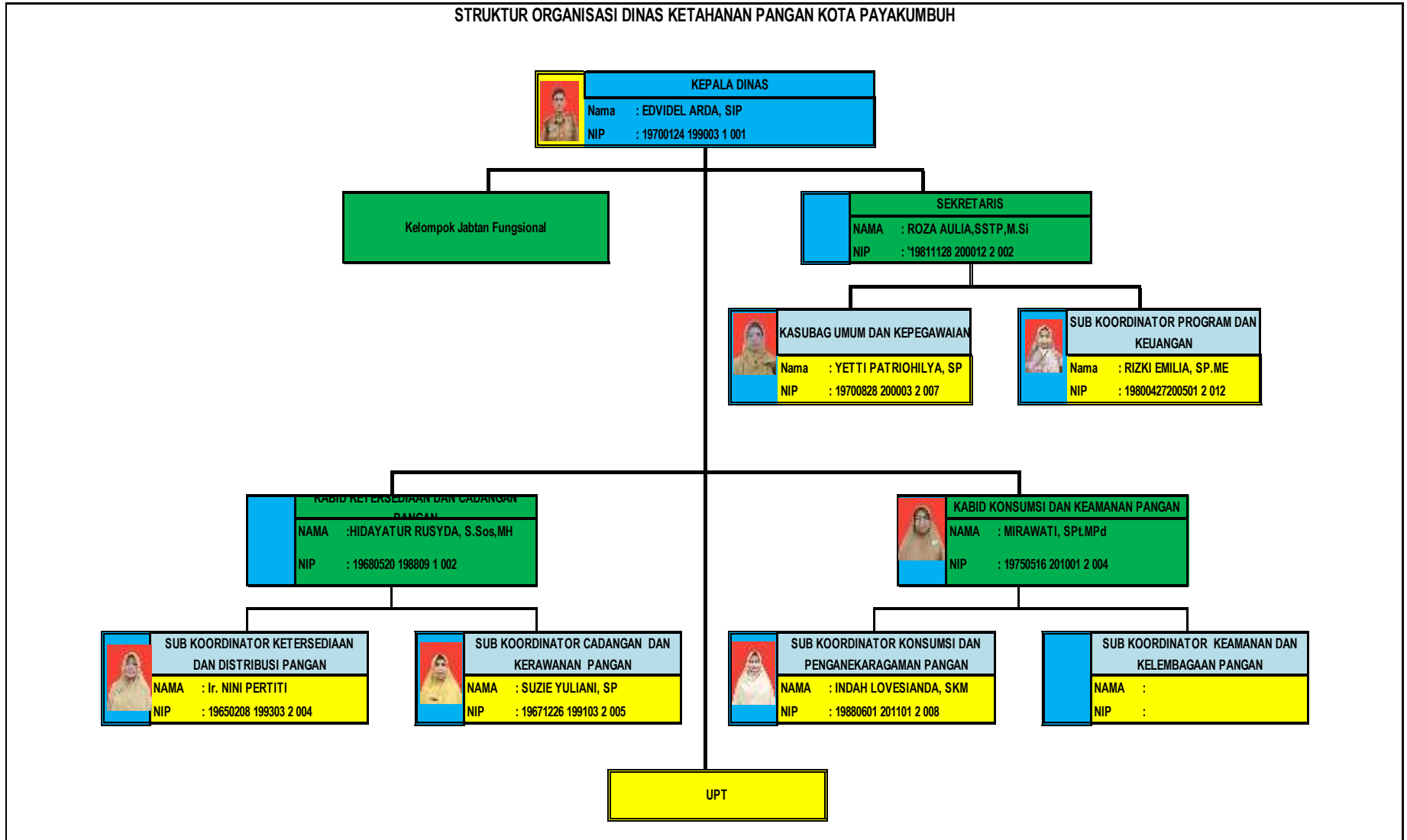
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dibentuk dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 95 Tahun 2016 yang kemudian diperbaharui dengan Perwako Nomor 53 Tahun 2021 adalah :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Program dan Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan membawahi;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Cadangan dan Kerawanan Pangan.

- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keamanan dan Kelembagaan Pangan.
- e. UPTD.

(Untuk lebih jelasnya terlampir Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH



2. Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pangan, melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, memantau dan melakukan evaluasi pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, melaksanakan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya serta melakukan tugas-tugas desentralisasi dari pemerintah pusat dibidang ketahanan pangan.

Adapun tugas pokok Kepala Dinas sebagai berikut:

Membantu Walikota dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan pelayanan pemerintah dibidang ketahanan pangan, melakukan tugas-tugas desentralisasi dari pemerintah pusat dibidang ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pangan.
- Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

- Pelayanan teknis dan administrasi terhadap semua urusan dilingkungan ketahanan pangan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang ketahanan pangan.
- Koordinasi perencanaan, implementasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketahanan pangan.
- Koordinasi perumusan kebijakan ketersediaan pangan dan cadangan pangan pemerintah serta masyarakat.
- Koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pemantauan ketahanan pangan, distribusi dan harga pangan, strategi serta penganeekaragaman konsumsi pangan.

- Koordinasi perumusan kebijakan kewaspadaan pangan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan gejala rawan pangan, keamanan pangan, peningkatan mutu pangan dan gizi.
- Pengorganisasian perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas dengan prinsip-prinsip pelayanan prima yang terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Aspek-aspek Strategis Organisasi

a. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, aman, dan bergizi untuk semua orang dalam suatu daerah baik yang berasal dari produk sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi konsumsi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat, baik dalam saat normal maupun saat terjadinya bencana. Ketersediaan untuk konsumsi pangan Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.1
Perbandingan Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

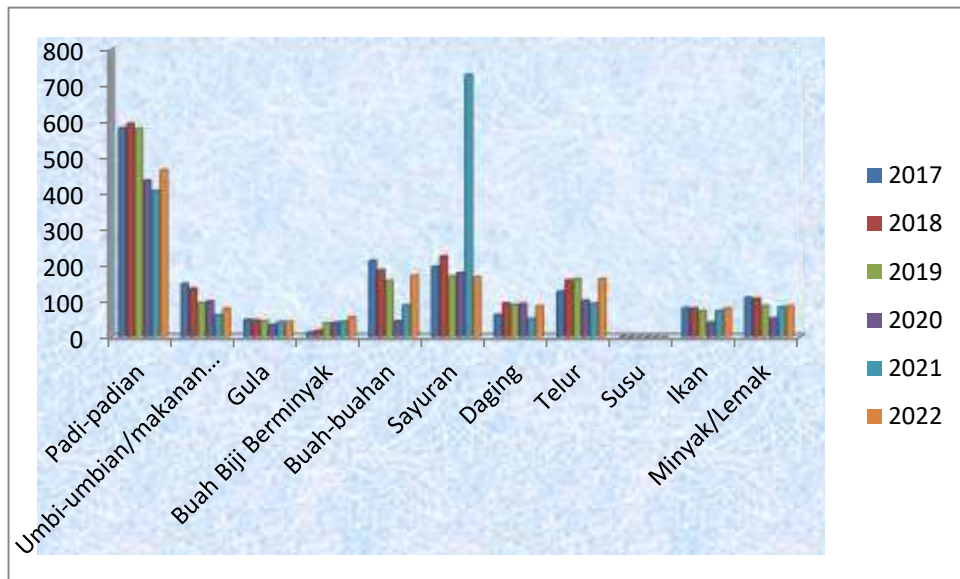
No.	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Pangan (Kg/Kap/Tahun)*)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi-padian	211,28	215,68	210,30	158,17	147,88	169,44
2	Umbi-umbian / Makanan Berpati	53,59	48,79	34,25	35,77	21,96	28,48
3	Gula	17,29	16,77	15,95	12,19	15,1	15,10
4	Buah Biji Berminyak	4,36	6,17	13,68	14,21	15,33	19,83
5	Buah-buahan	76,94	67,43	56,86	15,60	31,82	61,87
6	Sayuran	70,88	81,35	61,45	64,56	265,46	60,28
7	Daging	22,30	34,04	32,46	33,16	18,28	31,00
8	Telur	45,62	57,23	58,47	36,58	33,63	58,69
9	Susu**))	0,26	0,00	0,11	0,04	0,04	0,04

10	Ikan	29,16	28,69	26,05	14,52	26,34	28,67
11	Minyak/Lemak	39,57	38,45	31,44	18,84	30,17	31,13
	Jumlah	571,25	594,59	541,04	403,62	606,01	504,53

Sumber : Data diolah DKP, 2022

Jika di tuangkan dalam gambar, maka Ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi Penduduk Payakumbuh Tahun 2019 - 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 1.1
Perbandingan Ketersediaan Pangan (gr/kap/tahun)
untuk Dikonsumsi Penduduk
Kota Payakumbuh Tahun 2017- 2022



Sumber : Data diolah DKP, 2022

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Rata-rata ketersediaan pangan Tahun 2022 adalah 504,53 kg/kap/tahun, jika dibandingkan pada Tahun 2021 dengan rata-rata sebesar 606,01 kg/kap/tahun, terjadi penurunan pada sebesar 16,74%. Penurunan ketersediaan pangan di Kota Payakumbuh dibandingkan tahun sebelumnya tidak terjadi terlalu besar. Penurunan terjadi pada kelompok sayuran menurun sebesar 77,29%, sedangkan kelompok bahan pangan lainnya mengalami kenaikan.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pematapan ketersediaan pangan, yaitu berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; b) Penyempurnaan sistem pemantauan produksi dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan; c) Mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan pangan; dan d) Pengembangan akses pangan rumah tangga.

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kota Payakumbuh dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, pengelolaan lahan dan air merupakan sumber daya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Potensi sumber daya alam yang beragam dan dukungan ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir akan memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan.

b. Distribusi dan Harga Pangan

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien, sebagai persyaratan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim menurut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan, sehingga pangan tersedia sepanjang waktu di seluruh wilayah. Kinerja subsistem distribusi dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan sarana kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.

Kelembagaan pemasaran bahan pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, hal ini berpotensi menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi pada saat panen dan sebaliknya meningkatkan harga secara tajam pada musim paceklik. Selain itu, masih terdapat kelembagaan pemasaran yang dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan sistem yang adil diantara pelakunya.

Selanjutnya alur distribusi pangan dari produsen sampai ke konsumen terlihat melalui beberapa tingkatan pelaku distribusi. Pada setiap tingkatan pelaku distribusi tersebut memberikan margin keuntungan, sehingga semakin banyak tingkatan pelaku distribusi tersebut akan berdampak terhadap biaya yang dikeluarkan. Beban tersebut akan diteruskan kepada konsumen yang berakibat terhadap tingginya harga pangan.

Selain itu, distribusi pangan antar wilayah belum dapat dilihat secara cermat dan akurat pada saat ini. Diperlukan pemantauan arus masuk dan keluar pangan melalui pos-pos penjagaan TPR oleh Dinas Perhubungan dan pendirian pos-pos pangan di daerah perbatasan dengan kabupaten tetangga.

Sebagaimana dijelaskan diatas, arus distribusi pangan akan berdampak terhadap harga bahan pangan dan akan menentukan keterjangkauan rumah tangga terhadap bahan pangan. Perubahan dan fluktuasi harga pangan dapat terjadi sewaktu-waktu karena berbagai faktor seperti terjadinya panen raya, hari besar agama, gagal panen, terganggunya arus distribusi dan sebagainya.

Selanjutnya informasi harga pangan sangat diperlukan oleh produsen yaitu untuk melihat kapan memproduksi bahan pangan tersebut melalui pengaturan pola tanam, melihat peluang pasar yang ada, dan memperhatikan gejolak harga yang terjadi. Sedangkan bagi pemerintah diperlukan untuk mengambil kebijakan antisipasi terjadinya gejolak harga pada saat-saat tertentu dengan melakukan operasi pasar. Dengan demikian, diperlukan penataan jaringan informasi harga pangan, sehingga informasi harga sampai ke produsen dan pemerintah tepat waktu. Pada saat ini, informasi harga tersebut sampai ke produsen baru melalui pedagang-pedagang pengumpul/ pedagang besar, sehingga harga sudah terlebih dahulu naik di tingkat konsumen baru diikuti di tingkat produsen.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang dalam merumuskan kebijakan distribusi pangan, antara lain berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan untuk mendukung distribusi pangan yang mudah dan murah; b) Penyempurnaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis akses harga pangan masyarakat; c) Distribusi pangan

masyarakat; dan d) Pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan pengembangan lembaga pemerintah daerah.

c. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Konsumsi energi rata-rata perkapita perhari masyarakat Kota Payakumbuh adalah 2.021,8 kkalori/kapita/hari, sedangkan angka kecukupan energi (AKE) adalah sebesar 2.100 kkalori/kapita/hari. Data tersebut menunjukkan bahwa kuantitas konsumsi pangan Kota Payakumbuh Tahun 2022 berada dalam kategori tahan pangan. Artinya jumlah pangan yang dikonsumsi mencukupi kecukupan energi (90-119.9% AKE).

Untuk konsumsi protein, Angka kecukupan protein yang dianjurkan berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2019 adalah sebesar 57 gram/kapita/hari. Sedangkan konsumsi protein di Kota Payakumbuh sebesar 65.2 gram/kapita/hari. Konsumsi protein di Kota Payakumbuh sudah melebihi konsumsi protein yang dianjurkan. Konsumsi protein meliputi protein nabati dan protein hewani, dimana sumber protein hewani yaitu kelompok pangan hewani dan protein nabati adalah kelompok pangan kacang-kacangan.

Pangan segar yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat dapat berasal dari produksi dalam negeri dan dapat berasal dari pemasukan luar negeri atau impor. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang tidak akan berarti, jika makanan yang dikonsumsi masyarakat tidak aman dari cemaran. Cemaran adalah unsur lain yang ditemukan dalam pangan. Pangan menjadi tidak aman karena tercemar atau terkontaminasi oleh cemaran fisik, cemaran kimia dan cemaran biologis. Cemaran fisik diantaranya adalah kerikil, pecahan kaca, rambut, kuku dan logam. Cemaran kimia contohnya adalah residu pestisida, aflatoxin, logam berat dan bahan kimia berbahaya. Untuk cemaran biologis diantaranya adalah bakteri, jamur, virus dan cacing.

Keamanan pangan merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Mewujudkan keamanan pangan segar merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta pelaku usaha di sepanjang rantai pangan, mulai dari budidaya, panen, pascapanen, distribusi, retail, hingga pangan siap dikonsumsi.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki mempunyai tugas dan fungsi mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yaitu berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan, b) Penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan, dan c) Pembinaan untuk pengembangan kelembagaan dalam diversifikasi konsumsi pangan dan keamanan pangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 32 Tahun 2018 Tahun tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Dalam RPJMD Kota Payakumbuh telah ditetapkan Visi Kota Payakumbuh lima tahun kedepan yaitu ***Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, Dengan Semangat Kebersamaan, Menuju Payakumbuh Menang***". Dalam visi tersebut terdapat 5 (lima) misi yaitu (1) Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat, dan kompotitif, (2) Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan, (3) Meningkatkan penataan Kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan, (4) Menghadirkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, (5) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya, berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, maka Dinas Ketahanan Pangan juga mempunyai Visi Tahun 2017-2022 yaitu :

Terwujudnya ketahanan pangan Kota Payakumbuh yang mantap menuju masyarakat yang sehat, maju, sejahtera dan mandiri

Sedangkan untuk mewujudkan visi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

"Mewujudkan ketersediaan pangan, penganekaragaman, keamanan dan keterjangkauan pangan masyarakat"

- **Tujuan, Sasaran dan Indikator**

Selanjutnya Tujuan, Sasaran dan Indikator yang diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran (IKU/SPM)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-						Ket
				2017	1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh		Indeks Ketahanan Pangan	sedang	sedang	Tinggi	tinggi	Tinggi	Tinggi	
1.		Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan	1.Skor PPH Ketersediaan	80	83	86	90	94	96,5	IKU
2.		Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	2.Skor PPH Konsumsi	NA	80,5	82	86	90,5	93	IKU
			3.Tingkat Keamanan Pangan (%)	Sedang	sedang	Sedang	tinggi	Tinggi	Tinggi	IKU
3.		Meningkatnya kelancaran distribusi pangan	4. Stabilitas Harga (%)							
			Beras	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	IKU
			Cabe	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	IKU
			Bawang	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	IKU
			5. Stabilitas Pasokan (%)	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	IKU
4.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat	B	BB	BB	A	A	A	IKU

Sumber : DKP, 2020

- **Program dan Kegiatan**

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada Tahun 2017-2022 sesuai dengan visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan pangan; adalah **Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan.**

Sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Ket/Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1.	Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan	Skor PPH Ketersediaan	%	Memenuhi SPM Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan	Neraca Bahan Makanan (NBM)	
2.	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Skor PPH Konsumsi	%	Memenuhi SPM Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang	Neraca Bahan Makanan (NBM)	
		Tingkat Keamanan Pangan	%	Memenuhi SPM Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	Kualitas keamanan pangan Kota Payakumbuh yang digambarkan dari jumlah pangan segar yang aman dikonsumsi, dengan tingkatan : rendah : 0 % - 60% cukup : > 60% - 70% sedang : > 70% - 80% tinggi : > 80% - 100%	Hasil Uji Sampel	

3.	Meningkatnya kelancaran distribusi pangan	Stabilitas Harga								
		- beras	Harga beras dinyatakan stabil jika gejolak harga beras di suatu wilayah kurang dari 10% dari kondisi normal	%	10	10	10	10	10	10
		- cabe	Harga cabe dinyatakan stabil jika gejolak harga cabe di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal	%	25	25	25	25	25	25
		- bawang	Harga bawang dinyatakan stabil jika gejolak harga bawang di suatu wilayah kurang dari 10% dari kondisi normal	%	10	10	10	10	10	10
		Stabilitas Pasokan	Pasokan pangan dinyatakan stabil jika tersedia pasokan sebanyak 77 %	%	77	77	77	77	77	77

Sumber data : DKP, 2020

C. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja

Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan	1 Skor PPH Ketersediaan	90
2.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	2 Skor PPH Konsumsi	86
		3 Tingkat Keamanan Pangan	Tinggi
3.	Meningkatnya kelancaran distribusi pangan	4 Stabilitas Harga - Beras - Cabe - Bawang	≤10% ≤25% ≤10%
		5 Stabilitas Pasokan	≥77%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	6 Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan	A

Sumber : DKP, 2020

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil reviu

Reviu pada Rencana Strategis dilakukan karena telah diberlakukannya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan demikian terjadi perubahan pada Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, berikut turunannya yaitu Renstra Dinas.

Sehubungan dengan itu, maka dilakukanlah reviu internal terhadap dokumen Renstra Dinas antara lain :

1. Target Indikator Kinerja Utama disesuaikan kembali dengan melihat capaian kinerja selama ini serta pertimbangan teknis lainnya.
2. Program dan Kegiatan disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019

Berdasarkan hasil reviu dan ditindaklanjuti dengan Rancangan Awal Perubahan Resntra Dinas yang telah disepekat dengan Bappeda sesuai dengan Berita Acara Pembahasan dan Verifikasi Rancangan Awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Tanggal 1 Oktober 2020 adalah sebagai berikut :

1. Target Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Target Awal / Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Alasan Perubahan
1	Skor PPH Ketersediaan	94	88,5	Dari 9 kelompok bahan pangan yang ada, salah satu kelompok bahan pangan (kelompok kacang-kacangan) sulit mencapai target dikarenakan tidak ada didukung data produksi
2.	Skor PPH Konsumsi	90,5	84	Perubahan Target Indikator Sasaran karena merubah perilaku masyarakat dalam hal konsumsi protein, buah, sayuran memerlukan jangka waktu yang lebih lama, ini dapat kita lakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi B2SA secara terus menerus dan berkesinambungan
	Tingkat Keamanan Pangan	Tinggi	Tinggi	
3.	Stabilitas Harga <ul style="list-style-type: none"> - Beras - Cabe - Bawang 	$\leq 10\%$ $\leq 25\%$ $\leq 10\%$	$\leq 10\%$ $\leq 25\%$ $\leq 25\%$	bawang sebagaimana komoditas sayuran lainnya seperti cabe merupakan komoditas yang mudah rusak, sehingga fluktuasi harga untuk komoditas sayuran adalah 25%
	Stabilitas Pasokan	$\geq 77\%$	$\geq 77\%$	
4.	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan	A	A	

Sumber : DKP, 2020

2. Program dan Kegiatan

Telah dilakukan penyesuaian Program dan Kegiatan dengan mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 dengan melakukan pemetaan terhadap Program dan Kegiatan tersebut. Akan tetapi pelaksanaannya dimulai untuk Tahun 2021. Untuk Tahun 2020 tetap mengacu kepada Program dan Kegiatan yang lama.

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu Rencana Strategis Dinas juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas. Berdasarkan hasil reviu Indikator Kinerja Utama tidak mengalami perubahan, hanya target saja yang mengalami perubahan.

C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang mengalami revisi terhadap target, maka diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2022 sebagai berikut

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan	1 Skor PPH Ketersediaan	89
2.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	2 Skor PPH Konsumsi	85
		3 Tingkat Keamanan Pangan	Tinggi
3.	Meningkatnya kelancaran distribusi pangan	4 Stabilitas Harga - Beras - Cabe - Bawang	≤10% ≤25% ≤25%
		5 Stabilitas Pasokan	≥77%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	6 Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan	A

Sumber : DKP, 2022

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.721.591.837,-	APBD Kota
2	Peningkatan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 754.103.338,-	APBD Kota
3	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 29.180.070,-	APBD Kota
4	Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 25.639.234,-	APBD Kota
	TOTAL	Rp. 3.530.514.479,-	APBD Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

Tahun 2022

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Yellow
4	Kurang	50.00 – 64.99	Red
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022, dokumen perubahan awal Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Nomor : 520.64/SK/DKP-PYK/2018, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 4 (empat) sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Skor PPH Ketersediaan	Nilai	89	89,02	100,02
2	Skor PPH Konsumsi	Nilai	85	85,09	100,10
3	Tingkat Keamanan pangan	Level	Tinggi	Tinggi	100,00
4	Stabilitas Harga				
	a. Beras	%	≤10	2,95	170,5
	b. Cabe	%	≤25	32,74	69,04
	c. Bawang	%	≤25	16,64	133,44
5	Stabilitas Pasokan	%	≥77	79,00	102,59
6	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	A	A	100

Sumber : DKP, 2022

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Skor PPH Ketersediaan dengan capaian kinerja 100,02 %, Skor PPH Konsumsi dengan capaian sebesar 100,10%, Stabilitas Harga Beras 170,5%, Stabilitas Harga Bawang sebesar 133,44% dan Stabilitas Pasokan sebesar 102,59%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Tingkat Keamanan Pangan, dengan capaian kinerja 100% dan Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat. Sedangkan capaian kinerja yang kurang dari target / tidak tercapai ditunjukkan pada indikator Stabilitas Harga Cabe sebesar 69,04%.

Adapun pencapaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran diatas, dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Target Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Tahun 2022

No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	1	1	100,02				
2	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	2	2	100,10				
3.	Meningkatnya kelancaran distribusi pangan	2	2	113,45				

Sumber : DKP, 2022

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 5 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021		%	Capaian Tahun 2022		%	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 terhadap akhir renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Skor PPH Ketersediaan	%	88,5	88,77	100,05	89	89,02	100,02	Sangat baik	89	100,02

Sumber : DKP, 2022

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dilihat dari indikator : Skor PPH Ketersediaan.

Capaian kinerja nyata indikator Skor PPH Ketersediaan adalah sebesar 89,02 dari target sebesar 89 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,02 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini



hampir sama dari capaian tahun sebelumnya hanya saja sedikit turun 0,03 Point.

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dengan indikatornya ini menjadi sangat penting karena tertuang dalam SPM dan merupakan salah satu aspek

penting dalam penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun

2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah.

Indikator keberagaman ketersediaan pangan yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Penyusunan PPH dibuat berdasarkan pertimbangan ukuran pola konsumsi yang dibuat oleh FAO. Susunan PPH memuat 9 (sembilan) kelompok pangan mulai dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran dan buah, biji-bijian dan lemak berminyak, gula serta kelompok lain-lainnya.



Hasil penghitungan PPH Tahun 2022 yang didasarkan pada basis analisis data ketersediaan pangan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) TINGKAT KETERSEDIAAN
TAHUN 2022

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	1.664,97	69,37	0.50	34,69	25,00	25.00	+
2.	Umbi-umbian	101,95	4,25	0.50	2,12	2,12	2.50	-
3.	Pangan Hewani	390,49	16,27	2.00	32,54	24,00	24.00	+
4.	Minyak dan Lemak	777,68	32,40	0.50	16,20	5,00	5.00	+
5.	Buah/biji berminyak	71,91	3,00	0.50	1,50	1,00	1.00	+
6.	Kacang-kacangan	79,66	3,32	2.00	6,64	6,64	10.00	-

7.	Gula	151,53	6,31	0.50	3,16	2,50	2.50	+
8.	Sayuran dan buah	109,22	4,55	5.00	22,76	22,76	30.00	-
9.	Lain-lain			-			-	
	Jumlah	3.347,41	139,5		119,6	89,02	100.0	

Keterangan : * Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2.400 kkal/kap/hari

Skor Pola Pangan Harapan Kota Payakumbuh ditingkat Ketersediaan pada Tahun 2022 adalah sebesar 89,02 artinya bahwa ketersediaan energi di Kota Payakumbuh pada Tahun 2022 belum memenuhi kebutuhan gizi seimbang dan beragam. Ini dapat terlihat bahwa kelompok padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula skornya sudah di atas skor maksimal, sedang untuk kacang-kacangan, umbi-umbian serta sayuran dan buah, skornya belum mencukupi kebutuhan dimana skor Pola Pangan Harapan Ketersediaannya belum mencapai skor maksimal atau belum ideal.

Untuk itu perlu dilakukan peningkatan ketersediaan pada kelompok pangan kacang-kacangan, umbi-umbian, serta sayuran dan buah agar skor Pola Pangan Harapan yang ideal dapat dipenuhi. Apabila ketersediaan akan kelompok pangan tersebut cukup atau bahkan melebihi anjuran yang ada, maka akan berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat, hal ini akan memudahkan kita untuk menyarankan agar masyarakat mengkonsumsi seluruh kelompok bahan pangan tersebut sesuai dengan komposisi yang sesuai sehingga akan tercipta pola konsumsi yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Pola konsumsi yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) secara otomatis akan mampu meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH), karena adanya keseimbangan gizi dari setiap kelompok bahan pangan yang dikonsumsi.

Skor Pola Pangan Harapan bisa dijadikan sebagai dasar untuk perencanaan produksi dan penyediaan pangan jangka pendek atau jangka panjang dengan mempertimbangkan manajemen, sumber daya dan keberadaan intervensi pendidikan gizi. Secara umum, ketersediaan energi pada Tahun 2022 di Kota Payakumbuh telah sesuai dengan harapan bahkan sudah melampaui dimana besaran ketersediaan energinya mencapai 3.347,41 kkal/kap/hari. Kelompok bahan pangan padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, serta gula penyediaannya sudah melebihi dari yang diharapkan atau sudah mencapai batas

maksimal pencapaian ketersediaan energi dari bahan pangan tersebut. Sementara itu pada kelompok buah/biji berminyak, kelompok kacang-kacangan serta sayur dan buah masih perlu ditingkatkan lagi di Kota Payakumbuh pada tahun mendatang dalam jangka pendek atau jangka panjang minimal sebesar selisih atau kekurangan dari ketersediaan yang ideal.

Jika diperhatikan perkembangan capaian Skor PPH Ketersediaan ini dari tahun ke tahun dapat dijelaskan bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pada Tahun 2012 tercapai 71,55 dari target 74 atau terealisasi sebesar 96,68%. Dan untuk Tahun 2013 dari target 75 terealisasi sebesar 74,48 atau 99,3%. Tahun 2014 tercapai 77 dari target 76 atau 100% dan Tahun 2015 tercapai 79,13 dari target 77 atau 102,8% berikut makin meningkat di Tahun 2016 tercapai 78,84 dari target 78 atau 101,1%. Untuk lebih jelasnya Capaian Kinerja Sasaran 1 dari Tahun 2012-2022, dapat kita lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Indikator Skor PPH Ketersediaan
Tahun 2017-2022

No.	Indikator	Realisasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Skor PPH Ketersediaan	81,5	84,31	87,64	88,05	88,77	89,02

Sumber : Data diolah DKP, 2022

Dalam sepuluh tahun terakhir, indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan terus meningkat dan selalu mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dinilai baik dengan dapat tercapainya target kinerja yang telah direncanakan. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2012-2017 yaitu Tahun 2017, capaian kinerja Tahun 2017 sudah mencapai 101,8% dari target 80 tercapai 81,5. Capaian ini dinilai sangat baik karena sudah melebihi 100% begitu juga dengan target akhir Renstra 2017-2022 yakni 89 dapat tercapai.

Perbandingan nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari Tahun 2017– 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini :

TABEL 3.6
SKOR POLA PANGAN HARAPAN TAHUN 2017-2022

No	Kelompok pangan	Skor Maks	Skor PPH					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi-padian	25,00	25,0	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2	Umbi-umbian	2,50	2,5	2,50	2,50	2,50	1,64	2,12
3	Pangan Hewani	24,00	24,0	24,00	24,00	24,00	20,01	24,00
4	Minyak dan Lemak	5,00	5,0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Buah/Biji Berminyak	1,00	0,1	0,16	1,00	1,00	0,30	1,00
6	Kacang-kacangan	10,00	3,9	4,46	4,48	4,42	4,32	6,64
7	Gula	2,50	2,5	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
8	Sayur dan Buah	30,00	18,5	20,69	23,17	23,63	30,00	22,76
9	Lain-lain	0,00	-	-	-			
Total		100,00	81,51	84,31	87,64	88,05	88,77	89,02

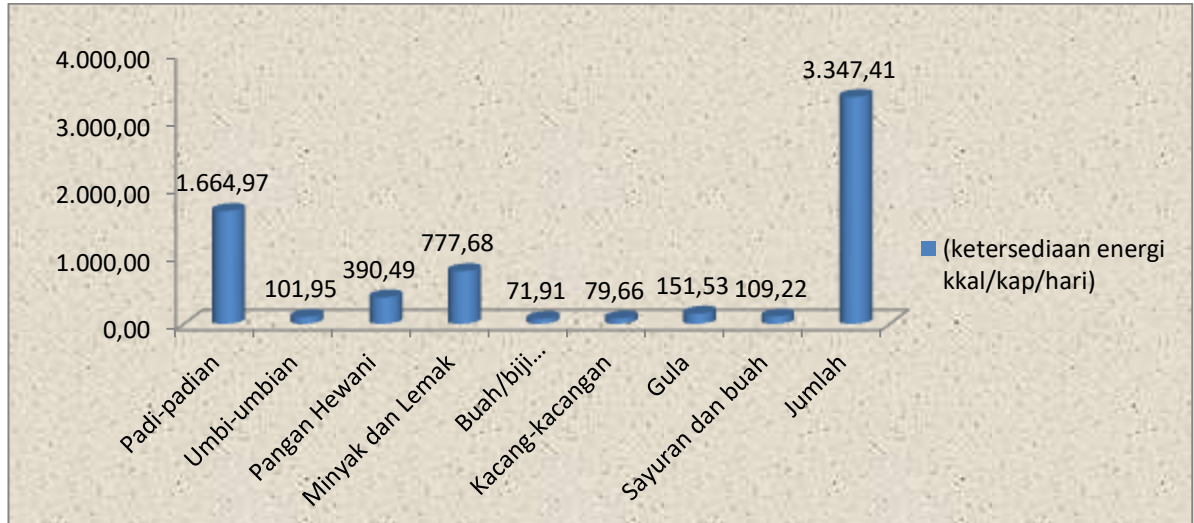
Sumber : Data diolah DKP, 2022



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 ketersediaan pangan di Kota Payakumbuh sudah cukup beragam. Hal ini dapat dilihat dari jenis pangan yang sudah mencapai skor maksimum, diantaranya padi-padian (25,00), pangan hewani (24,00), minyak dan lemak (5,00), Buah/biji berminyak (1,00), serta Gula (2,50). Sedangkan kelompok pangan yang belum mencapai skor maksimum adalah umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan ketiga kelompok pangan tersebut walaupun belum maksimal namun dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan, indikator ketersediaan energi dan ketersediaan protein untuk kab/kota di Indonesia haruslah memenuhi syarat minimal 90% dari angka kecukupan energi (AKE) 2.400 kkal/kapita/hari dan angka kecukupan protein (AKP) 57 gram/kapita/hari. Kota Payakumbuh telah memenuhi standar untuk kedua indikator tersebut. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa ketersediaan energi di Kota Payakumbuh untuk Tahun 2022 sebesar 3.347,41 kkal/kapita/hari. Seperti yang terlihat pada Grafik dibawah ini.

Gambar 3.1.
Ketersediaan Energi untuk dikonsumsi Penduduk Payakumbuh Menurut Kelompok Bahan Pangan Tahun 2022



Sumber : Data diolah DKP, 2022

Rata-rata ketersediaan energi menurut kelompok pangan dan ketersediaan protein menurut kelompok pangan akan memberikan kontribusi dalam menentukan skor PPH. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya skor PPH, yaitu :

1. Ketersediaan dana lintas sektoral untuk mendukung ketahanan pangan
2. Peningkatan produksi dan penganekaragaman pangan melalui Inovasi Teknologi, Intensifikasi, Ekstensifikasi, Pendampingan, Penyediaan Modal usaha dan Akses Pasar.

Sasaran pertama ***Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan*** masuk dalam Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Sub Kegiatan yaitu, Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan, Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisa Peta Ketahanan dan

Kerentanan Pangan, Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota.

Pada sasaran 1 ini termasuk kedalam Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.468.040,- dan realisasi sebesar Rp. 86.922.450,- atau 96,08 %. Serapan anggaran sebesar 96,08 % sedangkan alokasi anggaran Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 29.180.070,- dan realisasi sebesar Rp. 28.428.900,- atau 97,43%. Hal ini menunjukkan kinerja sasaran 1 ini cukup tinggi yang berarti kinerja Dinas pada program ini dinilai baik.

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran ***Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan*** disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Koordinasi lintas sektor yang semakin baik.
2. Semakin meningkatnya produksi pangan domestik dan perdagangan pangan.

Faktor Penghambat :

Masih kurang nya penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal seperti umbi-umbian dan sayuran yang disebabkan kurangnya permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tersebut sehingga berpengaruh terhadap ketersediaannya.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan***, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Keberagaman Ketersediaan Pangan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan	1.1	Skor PPH Ketersediaan	Nilai	89	89,02	100,02	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	90.468.040	86.922.450	96,08
								2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	29.180.070	28.428.900	97,42
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR							100,02	TOTAL PER SASARAN	119.648.110	115.351.350
							TINGKAT EFISIENSI	3,62 %				
							TINGKAT EFEKTIFITAS	103,75 %				

Sumber : DKP, 2022

Dari Tabel 3.7 diatas dapat dijelaskan, tingkat efisiensi berada pada nilai 3,62%, hal ini disebabkan oleh capaian kinerja 100,02% sedangkan capaian anggaran 96,40% sehingga jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan kinerja yang dihasilkan. Untuk tingkat efektifitas, pada sasaran 1 sebesar 100,75%. Hal ini menunjukkan tingkat efiseinsi yang cukup tinggi dengan tingkat efektifitas sebesar 103,75%. Angka ini mengindikasikan bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki kinerja yang efektif dan efisien karena dengan pencapaian yang melebihi target dapat dilakukan efisinsi sebesar 3,62% dari anggaran yang direncanakan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran ***Meningkatkan keberagaman ketersediaan pangan*** berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan.
2. Melakukan percepatan realisasi kegiatan.

Sasaran 2

Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021		%	Capaian Tahun 2022		%	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2021 terhadap akhir renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Skor PPH Konsumsi	%	84	84,20	100,24	85	85,09	100,10	Sangat baik	85	99,05
2	Tingkat Keamanan Pangan	Level	tinggi	tinggi	100	tinggi	tinggi	100	Sangat baik	Tinggi	100

Sumber : DKP, 2021

Sasaran meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu Skor PPH Konsumsi dan Tingkat Keamanan Pangan. Sasaran dengan 2 indikatornya ini juga tertuang dalam SPM dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan.

A. Indikator Pertama yaitu Skor PPH Konsumsi

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan (RPJMN) 2015-2019 ada empat (4) strategi utama :

1. Peningkatan ketersediaan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri.
2. Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan

Salah satu dari empat (4) arah kebijakan pangan yaitu perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat telah menjadi indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator kinerja dibidang ketahanan pangan yaitu pencapaian skor PPH Konsumsi. Pentingnya pencapaian skor PPH Konsumsi tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang



(UU) No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Tercapainya penganeekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai konsumsi pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Menurut FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH Konsumsi sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari Skor Pangan (dietary score) dan dikenalnya sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang.

Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula sayur dan buah. Skor PPH di niai dengan angka 100. Kegunaan PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan

penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Apabila terjadi ketergantungan pada jenis pangan tertentu, maka akan mengakibatkan konsumsi total meningkat dan menuntut produksi total yang tinggi pula. Oleh karena itu, jika terjadi sedikit saja gangguan pada ketersediaan pangan tersebut akan berakibat besar pada sistem ketahanan pangan nasional.

Apabila keragaman konsumsi pangan dibawah anjuran, maka tingkat konsumsi masyarakat perlu ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan pangan dan gizi, peningkatan ketersediaan, serta pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah.

Untuk penghitungan data PPH Konsumsi Tahun 2022 berdasarkan data sekunder berasal dari data hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu jenis data sekunder yang digunakan untuk analisis konsumsi pangan. Survey tersebut dilakukan oleh BPS setiap tahunnya yang terdiri dari data Nasional, Provinsi dan Kota. Data yang dikumpulkan merupakan data konsumsi/pengeluaran Rumah Tangga mencakup data makanan dan bahan makanann untuk konsumsi/pengeluaran makanan dikumpulkan data kuantitas dan nilainya sesuai dengan rincian komoditas yang terdapat pada kuisiонер Susenas. Dalam analisis konsumsi pangan, khususnya menggerakkan data survey konsumsi pangan, diperlukan data/instrument pendukung antara lain Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) , Daftar Ukuran Rumah Tangga (URT), Daftar Pangan Acuan, Daftar Konversi Perubahan Bentuk, Daftar Konversi Kode Kelompok Pangan, Daftar Konversi Penyerapan minyak.

Setelah dilakukan penghitungan PPH Konsumsi dengan Angka Kecukupan Energi 2.100 kkal/kapita/hari dan Angka Kecukupan Protein 57 gr/kapita/hr didapat nilai PPH Konsumsi Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebesar 85,09 dengan capaian kinerja 100,10% termasuk kategori sangat baik.

Hasil penghitungan PPH tahun 2022 yang didasarkan pada basis data survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini

Tabel 3.9
SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KONSUMSI
TAHUN 2022

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/ Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	284,6	1,154	57,1	54,9	0,5	28,5	27,5	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	44,0	41	2,0	1,9	0,5	1,0	1,0	2,5	1,0
3	Pangan Hewani	121,0	272	13,5	13,0	2,0	26,9	25,9	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	30,8	277	13,7	13,2	0,5	6,8	6,6	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	6,5	35	1,7	1,7	0,5	0,9	0,8	1,0	0,8
6	Kacang-kacangan	13,5	64	3,2	3,2	2,0	6,4	6,1	10,0	6,1
7	Gula	13,0	48	2,4	2,3	0,5	1,2	1,1	2,5	1,1
8	Sayur dan Buah	207,5	92	4,6	4,4	5,0	22,9	22,0	30,0	22,0
9	Lain-lain	71,7	39	1,9	1,8	-	-	-	-	-
	Total		2,022	100	96,3		94,6	91,1	100,	85,09

Sumber : Data Susenas Tahun 2021

Keterangan = *) Angka Kecukupan Energi = 2.100/kkal/kapita/hari

*) Angka Kecukupan Protein = 57 gram/kap/hari

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1 diatas, terlihat bahwa skor PPH Kota Payakumbuh adalah sebesar **85,09** (AKE 2100 kkal/kap/hari dan AKP 57 gram/kap/hari). Angka ini masih jauh dari target ideal skor PPH yang diharapkan (100). Kualitas konsumsi

pangan Kota Payakumbuh tahun 2022 belum beragam, ditandai dengan skor PPH sebesar 85,09 belum mencapai skor PPH ideal 100. Oleh karena itu untuk kedepannya dibutuhkan upaya-upaya dan langkah-langkah yang tepat dan nyata untuk merubah pola pikir masyarakat agar ikut dan mampu melaksanakan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan mau menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Untuk mengejar ketertinggalan dalam mencapai target PPH maka perlu ditingkatkan konsumsi beberapa kelompok pangan yang perlu diperbaiki terutama konsumsi pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, gula, buah/biji berminyak, serta sayur dan buah. Adapun konsumsi energi kelompok pangan yang tergolong berlebih yakni padi-padian, pangan hewani serta minyak dan lemak.

Untuk konsumsi kelompok pangan padi-padian yang didominasi oleh konsumsi beras sudah melebihi target yang dianjurkan. Diversifikasi pangan terutama penghasil karbohidrat sangat dianjurkan agar konsumsi kelompok padi-padian tidak melebihi konsumsi yang dianjurkan. Kelompok pangan umbi-umbian sebagai penghasil sumber karbohidrat selain padi-padian masih dibawah target yang dianjurkan. Kedepannya konsumsi karbohidrat sumber umbi-umbian perlu digalakkan agar diversifikasi pangan dapat terlaksana dengan baik. Untuk kelompok pangan hewani sudah melebihi target yang dianjurkan, didominasi oleh konsumsi daging ayam ras, ikan mas dan nila, telur ayam ras, tongkol, tuna, teri, susu bubuk, telur puyuh, daging, lele.

Kualitas Konsumsi pangan Kota Payakumbuh sudah cukup baik (Skor PPH 85,09). Akan tetapi masih belum sesuai dengan yang diharapkan disebabkan oleh :

- Konsumsi pangan sumber karbohidrat (beras dan terigu) melebihi anjuran
- Konsumsi pangan hewani masih kurang
- Konsumsi umbi-umbian masih kurang
- Konsumsi kacang-kacangan masih kurang
- Konsumsi sayuran dan buah masih kurang
- Disamping itu disebabkan juga oleh rendahnya daya beli masyarakat

Solusinya adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia disekitar rumah untuk meningkatkan kecukupan pangan dan gizi keluarga yaitu melalui pemanfaatan pekarangan yang dikelola dan dikembangkan keluarga. Dengan memanfaatkan pekarangan secara intensif diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan ditingkat rumah tangga dan menambah pendapatan keluarga apabila produksinya berlebih yang paling penting dapat meningkatkan Skor PPH Konsumsi.

Jika diperhatikan perkembangan capaian Skor PPH Konsumsi ini dari tahun ke tahun dapat dijelaskan bahwa Indikator Skor PPH Konsumsi dijadikan sebagai indikator dalam sasaran ***Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman*** baru dilakukan pada Tahun 2018. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran untuk penghitungan Skor PPH Konsumsi. Capaian kinerja indikator Skor PPH Konsumsi untuk Tahun 2018 yakni diperoleh skor 84,1

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pada Tahun 2019 tercapai 82 dari target 82 atau terealisasi sebesar 100 %. Dan untuk Tahun 2020 dari target 83 terealisasi sebesar 83,7 atau 100,84%. Tahun 2021 tercapai 84,20 dari target 84 atau 100,24%. Untuk lebih jelasnya Capaian Kinerja Sasaran 1 dari Tahun 2018-2022, dapat kita lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Indikator Skor PPH Konsumsi
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Skor PPH Konsumsi	84,1	82	83,7	84,20	85,09

Sumber : Data diolah DKP, 2022

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ini artinya konsumsi pangan masyarakat kota payakumbuh sudah semakin beragam.

Pada tahun berikutnya diharapkan terjadi peningkatan hingga target skor Pola Pangan Harapan (PPH) bernilai 100 dapat tercapai, karena sasaran pembangunan nasional dibidang pangan dan gizi adalah terwujudnya ketahanan pangan dan gizi pada tingkat rumah tangga yang tercermin pada ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup mutu dan gizinya, layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu.

- **Konsumsi Pangan Penduduk Kota Payakumbuh**

Konsumsi pangan per kelompok pangan di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut.

Tabel 3. 11
Konsumsi Pangan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2022

Kelompok/Jenis Pangan	Kandungan Gizi		Konsumsi Pangan		Kebutuhan Pangan Kg/Kapita /Tahun
	Energi (kkal/hr)	Protein (gr/hr)	Gr/kap /hr	Kg/kap /thn	
1. Padi-Padian					
Beras	853,8	19,8	241,6	88,2	97,0
Jagung	1,9	0,1	1,1	0,4	0,4
Terigu	298,1	6,5	41,9	15,3	16,8
Subtotal Padi-padian	1.153,8	26,3	284,6	103,9	114,3
2. Umbi-umbian					
Singkong	26,7	0,2	22,7	8,3	9,1
Ubi Jalar	3,8	0,0	3,1	1,1	1,2
Kentang	9,0	0,3	17,3	6,3	7,0
Sagu	-	-	-	-	-
Umbi Lainnya	1,1	0,0	1,0	0,4	0,4
Subtotal Umbi-umbian	40,6	0,6	44,0	16,1	17,7
3. Pangan Hewani					
Daging Ruminansia	84,0	4,9	15,7	5,7	6,3
Daging Unggas	70,7	5,2	23,1	8,4	9,3
Telur	33,9	2,7	24,1	8,8	9,7
Susu	23,2	0,9	5,3	1,9	2,1
Ikan	60,4	9,3	52,9	19,3	21,2

Kelompok/Jenis Pangan	Kandungan Gizi		Konsumsi Pangan		Kebutuhan Pangan Kg/Kapita /Tahun
	Energi (kkal/hr)	Protein (gr/hr)	Gr/kap /hr	Kg/kap /thn	
Subtotal Pangan Hewani	272,1	23,0	121,0	44,2	48,6
4. Minyak dan Lemak					
Minyak Kelapa	6,0	0,0	0,7	0,3	0,3
Minyak Lainnya	265,3	-	29,4	10,7	11,8
Margarin	5,6	0,0	0,7	0,2	0,3
Subtotal Minyak dan Lemak	277,0	0,0	30,8	11,2	12,4
5. Buah/Biji Berminyak					
Kelapa	34,7	0,3	6,5	2,4	2,6
Kemiri	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotal Buah/Biji Berminyak	34,8	0,3	6,5	2,4	2,6
6. Kacang-kacangan					
Kacang Kedelai	59,1	2,9	11,2	4,1	4,5
Kacang Tanah	1,6	0,1	0,3	0,1	0,1
Kacang Hijau	3,4	0,3	1,9	0,7	0,7
Kacang lain	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0
Subtotal Kacang-kacangan	64,3	3,3	13,5	4,9	5,4
7. Gula					
Gula Pasir	46,4	0,0	12,5	4,6	5,0
Gula Merah	1,8	0,0	0,5	0,2	0,2
Subtotal Gula	48,2	0,0	13,0	4,7	5,2
8. Sayur dan Buah					
Sayur	44,1	2,3	112,3	41,0	45,1
Buah	48,4	0,6	95,2	34,7	38,2
Subtotal Sayur dan Buah	92,5	2,9	207,5	75,7	83,3
9. Lain-lain					
Minuman	35,8	1,2	64,7	23,6	26,0
Bumbu	2,7	0,1	7,1	2,6	2,8
Subtotal Lain-lain	38,5	1,2	71,7	26,2	28,8

Sumber data : Data Susenas 2021

Dari Tabel 3.11 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada kelompok pangan padi-padian, konsumsi pangan yang dominan di Kota Payakumbuh adalah beras dibandingkan dengan jagung dan terigu. Konsumsi kelompok pangan padi-padian ini sudah melebihi target. Kedepannya konsumsi padi-padian ini diharapkan dapat lebih ditekan/dikurangi agar mencapai target yang dianjurkan.

2. Untuk kelompok pangan umbi-umbian, konsumsinya belum mencapai target konsumsi pangan umbi-umbian. Komoditi pangan umbi-umbian yang sangat dominan yang dikonsumsi masyarakat di Kota Payakumbuh yaitu singkong dibandingkan dengan komoditi umbi-umbian lainnya seperti ubi jalar, kentang, sagu dan umbi lainnya seperti alas. Konsumsi umbi –umbian untuk Kota Payakumbuh karena tidak ada kegiatan spesifik dari dinas terkait yaitu pertanian untuk menunjang peningkatan hasil umbi umbian karena hanya ditanam dilahan – lahan kurang produktif. Umbi yang dihasilkan Kota Payakumbuh rata-rata dikonsumsi dalam bentuk sanjai, karak kaliang, kerupuk ubi, kerupuk balado, kerupuk talas, makanan ini dikonsumsi masuk dalam kategori makanan ringan dalam penghitungan tidak mendukung PPH Konsumsi umbi umbian
3. Pada kelompok pangan hewani, konsumsi pangannya melebihi target. Komoditi pangan hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat di Kota Payakumbuh yaitu telur ayam ras dan daging ayam ras.
4. Pada kelompok pangan minyak dan lemak sudah melebihi target dikarenakan tingginya konsumsi pada komoditi minyak sawit.
5. Untuk kelompok pangan buah/biji berminyak konsumsinya belum mencapai target. Komoditi yang banyak dikonsumsi adalah kelapa seperti dalam pembuatan rendang, gulai, takjil ketika ramadhan yang membutuhkan kelapa sehingga konsumsinya lebih banyak dibandingkan kemiri.
6. Pada kelompok pangan kacang-kacangan, konsumsinya juga belum mencapai target. Untuk kelompok pangan kacang-kacangan, jenis pangan yang dominan dikonsumsi yaitu kacang kedelai. Hal ini bisa disebabkan karena konsumsi olahan kacang kedelai dalam bentuk tahu dan tempe.
7. Untuk kelompok pangan gula konsumsinya belum mencapai target. Komoditi yang dominan dikonsumsi yaitu jenis pangan gula pasir yang biasa digunakan pada setiap minuman seperti teh, kopi, dll. Walaupun gula pasir dominan dikonsumsi akan tetapi belum mencapai target yang diharapkan.

8. Pada kelompok pangan sayur dan buah konsumsinya belum mencapai target yang dianjurkan. Dari kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, sayuran sudah diproduksi dari halaman sendiri untuk dikonsumsi, kondisi kurang konsumsi sayur permasalahannya pada merubah kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi sayur setiap kali makan karena sayur yang ada dipekarangan ada sebagian anggota KWT tidak mau memetik karena bagus dipandang melihat sayuran yang subur, untuk merubah perilaku dan kebiasaan makan sayur pada masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). Diharapkan kedepannya masyarakat Kota Payakumbuh untuk dapat mengkonsumsi sayur dan buah secara rutin setiap kali makan

- **Perkembangan Capaian Konsumsi Energi dan Protein Kota Payakumbuh**

Perkembangan capaian konsumsi energi dan protein setiap kelompok pangan di Kota Payakumbuh pada tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut ini :

Tabel 3.12
Perkembangan Capaian Konsumsi Energi dan Protein Perkelompok Pangan
Tahun 2020 s/d 2022

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)			Konsumsi Protein (gram/kap/hr)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Padi-padian	1.254	1.178	1.154	28.4	26.9	26.3
2	Umbi-umbian	38	66	41	0.6	3.2	0.6
3	Pangan hewani	353	302	272	28.1	14.7	23.0
4	Minyak dan lemak	269	251	277	0.0	12.3	0.0
5	Buah biji berminyak	35	31	35	0.3	1.5	0.3
6	Kacang-kacangan	32	28	64	3.2	1.4	3.3
7	Gula	63	51	48	0.1	2.5	0.0
8	Sayur dan buah	98	101	92	3.1	4.9	2.9
9	Lainnya	45	38	39	1.3	1.9	1.2
	Jumlah	2.187	2.045	2.022	65.2	59.2	57.7

Sumber : Analisis data PPH berdasarkan data Susenas 2020 s/d 2022

Dari Tabel 3.12 diatas, hasil analisa perkembangan capaian konsumsi energi dan protein dari 9 (sembilan) kelompok pangan terjadi fluktuasi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Konsumsi energi secara keseluruhan dari 9 (sembilan) kelompok pangan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi penurunan yaitu tahun 2020 adalah 2.187 kkal/kap/hr, tahun 2021 adalah 2.045 kkal/kap/hr, dan tahun 2022 adalah 2.022 kkal/kap/hr. pada tahun 2021 dan 2022 lebih rendah dari Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2018 yaitu 2.100 kkal/kap/hr tetapi masih dalam kategori normal.
2. Konsumsi protein secara keseluruhan dari 9 (sembilan) kelompok pangan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terjadi penurunan, yaitu tahun 2020 adalah 65,2 gram/kap/hr, tahun 2021 adalah 59.2 gram/kap/hr, dan tahun 2022 adalah 57.7 gram/kap/hr. Konsumsi protein tahun 2020 s/d 2022 lebih tinggi dari Angka Kecukupan protein yang dianjurkan Widya Karya Nasional pangan dan Gizi tahun 2018 yaitu 57 gram/kap/hr.

B. Indikator kedua adalah Tingkat Keamanan Pangan



Makanan merupakan sumber energi dan sebagai zat gizi untuk mendukung hidup manusia. tetapi makanan juga dapat menjadi wahana bagi unsur pengganggu kesehatan manusia. secara umum bahaya yang timbul dari makanan/minuman sering disebut keracunan makanan. Timbulnya bahaya dapat terjadi melalui unsur mikroorganisme, kimia atau alami.

Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam upaya mewujudkan sistem jaminan mutu di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan standarisasi melalui Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang “standarisasi Nasional” yang selanjutnya PP dimaksud dijabarkan di sektor pertanian melalui keputusan-keputusan Menteri Pertanian No. 170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional di sektor pertanian. Dalam keputusan ini juga memuat tentang kebijakan sistem jaminan mutu di sektor pertanian.

Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat di Kota Payakumbuh supaya masyarakat terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh bahan-bahan berbahaya, seperti residu pestisida, bakteri, dan formalin. Maka perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar di Kota Payakumbuh. Adapun pengawasan dan pengambilan sampel bahan pangan telah dilaksanakan 1 kali sebanyak 10 sampel yang terdiri dari uji residu pestisida dan uji formalin.

Pengujian sampel dilakukan terhadap 10 sampel pangan segar diantaranya pangan segar asal tumbuhan dan pangan segar asal hewan. Sampel pangan segar diambil dari Pasar Ibu Kota Payakumbuh. Pemeriksaan sampel dilakukan sebanyak 2 kali, yakni 1 kali uji residu pestisida dan 1 kali uji formalin.

- Uji Residu Pestisida

Uji residu pestisida dilakukan terhadap sampel pangan segar asal tumbuhan dengan jumlah 4 (empat) sampel, diantaranya cabe dumai, mangga, apel, dan terung. Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 28 Maret 2022. Sampel pangan tersebut diantarkan ke Laboratorium Pestisida Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat di Padang pada tanggal 29 Maret 2022. Dari pengujian sampel diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.13
Hasil Uji Residu Pestisida

No	Komoditi	Jenis	Hasil (mg/kg)	Batas Penetapan (mg/kg)	BMR (mg/kg)
1.	Cabe Dumai	Profenofos	0,884	0,005	3,000
		Dimethoat	0,069	0,024	-
		Klorpyrifos	Tidak terdeteksi	0,059	-
2.	Apel	Melation	Tidak terdeteksi	0,060	0,500
		Methidation	Tidak terdeteksi	0,035	0,500
		Klorpyrifos	Tidak terdeteksi	0,059	-
			Tidak terdeteksi		
3.	Terung	Profenofos	Tidak terdeteksi	0,005	-
		Diazinon		0,020	0,500

		Klorpyrifos Methyl	Tidak terdeteksi	0,059	1,000
			Tidak terdeteksi		
4.	Mangga	Profenofos	Tidak terdeteksi	0,005	0,200
		Dimethoat		0,024	1,000
		klorpyrifos	Tidak terdeteksi	0,059	-
			Tidak terdeteksi		

Sumber : DKP, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa yang terdeteksi mengandung pestisida adalah cabe dumai, tetapi masih berada di bawah Batas Maksimum Residu (BMR) artinya masih aman untuk dikonsumsi

- Uji Formalin

Uji formalin dilakukan terhadap sampel pangan segar asal hewan sebanyak 6 (enam) sampel diantaranya 2 (dua) sampel ikan segar yakni ikan sisik dan ikan balato, 4 (empat) ikan kering yakni bada balang, teri, sepat, belalang. Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 12 Juli 2022. Sampel pangan tersebut diantarkan ke UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang. Dari pengujian sampel diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.14
Hasil Uji Kandungan Formalin

No	Sampel	Formalin
1.	Sisik	Negatif
2.	Balato	Negatif
3.	Bada Balang	Negatif
4.	Teri	Negatif
5.	Sepat	Negatif
6.	Belalang	Positif

Sumber : DKP, 2022

Dari hasil pemeriksaan sampel terdapat 1 (satu) sampel yang terdeteksi positif mengandung formalin, yaitu ikan belalang kering. Untuk tindak lanjut hasil pemeriksanaan ini sampaikan ke pedagang yang bersangkutan dan dihimbau agar pedagang tidak menjual ikan tersebut.

Dari pemeriksaan terhadap 10 sampel yang terdiri dari residu pestisida 4 komoditi dan formalin 6 jenis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

No	Pemeriksaan Yang Dilakukan	Jumlah sampel diperiksa	Hasil Analisa Yang Tidak Aman	% sampel makanan yang aman dikonsumsi	Ket
1.	Residu pestisida	4	0 komoditi	100%	tinggi
2.	Formalin	6	1 komoditi	83,33 %	tinggi
Tingkat Keamanan Pangan				91,6	Tinggi

Keterangan Level Tingkat Keamanan :

- 0 -60 % : Tidak Aman
- 61 – 75 % : Cukup
- 76 – 85 % : sedang
- 86 – 100 % : Tinggi

Jika diperhatikan perkembangan capaian Tingkat Keamanan Pangan ini dari tahun ke tahun dapat dijelaskan bahwa Tingkat Keamanan Pangan pada Tahun 2017 tercapai 100% dari target level sedang, begitu juga dari Tahun 2018- 2022 terealisasi 100% .Untuk lebih jelasnya Capaian Kinerja Tingkat Keamanan Pangan dari Tahun 2017-2022, dapat kita lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Indikator Tingkat Keamanan Pangan
Tahun 2017-2022

No.	Indikator	Satuan	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat Keamanan Pangan	Level	Sedang	sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : DKP, 2022



Sasaran kedua ***Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman*** masuk dalam Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat serta Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Pada sasaran 2 ini termasuk kedalam Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 647.336.278,- dan realisasi sebesar Rp. 639.029.250,- atau 98,72%. Dan program Pengawasan Keamanan Pangan dengan alokasi anggaran Rp. 25.639.234,- dan realisasi sebesar Rp. 23.404.140,- atau 91,28%. Serapan anggaran untuk sasaran ini cukup tinggi yang berarti kinerja Dinas pada program ini dinilai baik.

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran ***Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman*** disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung : Didukung dengan program beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA), serta sosialisasi keamanan pangan. Masalah keamanan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja, tetapi merupakan tugas bersama antara institusi dan stake holder dengan membentuk jejaring kerja (Networking) yang berjalan secara efektif dan efisien.

Faktor Penghambat

Terbatasnya SDM dalam penanganan keamanan pangan, masih rendahnya kesadaran masyarakat (produsen/petani/pedagang/konsumen) tentang keamanan pangan, kurangnya monitoring yang terintegrasi antara instansi yang berwenang, belum tersedianya laboratorium pengujian mutu dan keamanan pangan di Kota Payakumbuh.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman***, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.16

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	1.1	Skor PPH Konsumsi	%	85	85,09	100,10	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	647.336.278	639.029.250	98,72
		1.2	Tingkat Keamanan Pangan	Level	tinggi	tinggi	100	2.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	25.639.234	23.404.140	91,28
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR						100,42	TOTAL PER SASARAN		672.975.512	662.433.390
TINGKAT EFISIENSI 1,99%												
TINGKAT EFEKTIFITAS 102,02 %												

Sumber : DKP, 2022

Dari Tabel 3.16 diatas dapat dijelaskan, tingkat efisiensi berada pada nilai 1,99%. Hal ini menunjukkan tingkat efiseinsi yang cukup tinggi dengan tingkat efektifitas sebesar 102,02%. Angka ini mengindikasikan bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki kinerja yang efektif dan efisien karena dengan pencapaian yang melebihi target dapat dilakukan efisini sebesar 1,99% dari anggaran yang direncanakan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran **Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam,bergizi seimbang dan aman** berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan pelatihan atau bimtek untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas petugas pengawas.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawas keamanan pangan.
3. Koordinasi dan sinkronisasi dalam wadah jejaring keamanan pangan.
4. Menggiatkan sosialisasi dan promosi keamanan pangan secara berkesinambungan.

Sasaran 3
Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021		% Realisasi	Capaian Tahun 2022		%	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 terhadap akhir renstra (%)
			Target			Target	Realisasi				
1	Stabilitas Harga										
	* beras	%	≤10	1,78	182,2	≤10	2,95	170,5	Sangat baik	10	170,5
	* cabe	%	≤25	18,85	124,6	≤25	32,74	69,04	Cukup	25	69,04
	* bawang	%	≤25	11,08	155,68	≤25	16,64	133,44	Sangat baik	25	133,44
2	Stabilitas Pasokan	%	≥77	79	102,59	≥77	79,00	102,59	Sangat baik	77	102,59
	Rata-rata Capaian Kinerja				142,98	≤10		118,89	Sangat baik		118,89

Sumber : Data diolah, DKP 2022

Sasaran meningkatnya kelancaran distribusi pangan dilihat dari indikator : Stabilitas Harga Beras, Stabilitas Harga Cabe, Stabilitas Harga Bawang, dan Stabilitas Pasokan dengan rata-rata capaian kinerja 118,89% kategori sangat baik

Capaian kinerja indikator Stabilitas Harga Beras adalah sebesar 2,95 % dari target sebesar 10% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 170,5 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini sedikit mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya

Capaian kinerja indikator Stabilitas Harga Cabe adalah sebesar 32,74 % dari target sebesar 25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 69,04% dengan kategori cukup. Capaian ini lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya.

Capaian kinerja indikator Stabilitas Harga Bawang adalah sebesar 16,64 % dari target sebesar 25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 133,44 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya.

Capaian kinerja nyata indikator Stabilitas Pasokan adalah sebesar 79,00% dari target sebesar 77% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 102,59 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya.

Sasaran meningkatnya kelancaran distribusi pangan dengan indikatornya ini menjadi sangat penting karena tertuang dalam SPM dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah.

Agar produksi pangan dapat berkelanjutan, dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi, pemerintah harus melindungi masyarakat dan petani dari gejolak harga, seperti harga jatuh pada saat panen raya, dan harga melambung pada saat di luar panen. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan kebijakan stabilisasi harga pangan agar petani sebagai produsen mendapatkan hasil yang menguntungkan, dan masyarakat sebagai konsumen mampu membeli bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

Kebijakan stabilisasi harga pangan berperan dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan/stabilitas politik nasional. Pengalaman Tahun 1996 dan Tahun 1998 membuktikan bahwa terjadinya goncangan ekonomi yang kemudian berubah menjadi krisis politik, terjadi karena harga pangan melonjak drastis dalam jangka waktu

yang pendek. Untuk menghindari terulangnya kejadian tersebut, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan stabilitas harga pangan yang komprehensif dan dapat merespon beberapa perubahan lingkungan strategis seperti dinamika ekonomi global dan perubahan sistem manajemen pemerintahan agar krisis ekonomi dan krisis politik tidak terulang kembali.

Koefisien Variasi (CV) merupakan suatu ukuran variasi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda atau perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Dalam analisis harga koefisien variasi digunakan untuk mengetahui kestabilan harga. Dalam sistem distribusi dan harga pangan, bahwa harga bahan pangan pokok di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai koefisien variasi (CV) nya berada dibawah 10% untuk beras dan dibawah 25% untuk cabe dan bawang . Apabila CV berada diatas 10% dan 25% maka terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di suatu wilayah di tingkat konsumen.

A. Indikator Pertama Stabilitas Harga

- **Harga Beras**



Gambaran gejala harga bahan pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Gambaran gejala Harga Bahan Pangan Pokok dan Coefisien Variasi (CV) Tingkat
Konsumen Tahun 2022

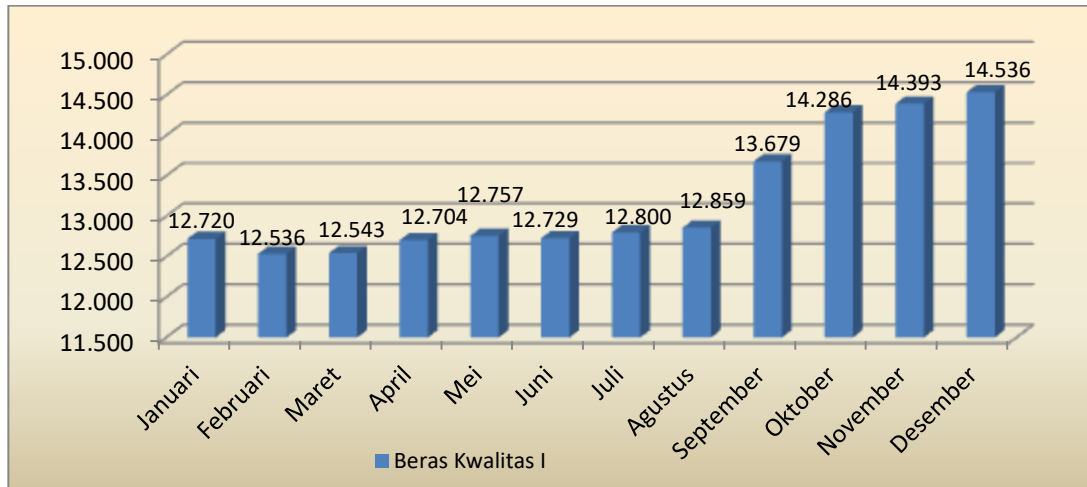
No.	Bulan	Harga Rata-rata Beras KW I di tingkat Konsumen
1	Januari	12.720
2	Februari	12.536
3	Maret	12.543
4	April	12.704
5	Mei	12.757
6	Juni	12.729
7	Juli	12.800
8	Agustus	12.859
9	September	13.679
10	Oktober	14.286
11	Nopember	14.393
12	Desember	14.536
Rata-rata		13.211
H-MAX		14.536
H-MIN		12.536
CV		2,95

Sumber : Data diolah, DKP 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Koefisien Variasi Beras telah mencapai target yaitu $CV \leq 10\%$. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2022 harga beras Kualitas I dalam kondisi stabil, yang ditunjukkan dengan nilai CV 2,95%.

Untuk melihat pergerakan harga beras kualitas I dapat kita lihat lebih jelas lagi melalui grafik dibawah ini

Gambar 3.2.
Perkembangan Harga Beras Kualitas I di Tingkat Konsumen



Sumber : DKP, 2022

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan harga beras kualitas I di tingkat konsumen berbanding lurus dengan perkembangan harga di tingkat produsen. Harga tertinggi beras kualitas I di tingkat konsumen terjadi pada bulan Desember dengan harga rata-rata Rp. 14.536,-/kg. Pada bulan-bulan lainnya dibawah harga tersebut, dengan harga terendah terjadi pada bulan Februari pada rata-rata harga mencapai Rp.12.536,-/kg.

Harga beras mulai mengalami kenaikan mulai dari bulan September dari harga Rp.12.859,-/kg naik menjadi Rp. 13.679 dan terus naik sampai puncaknya di bulan Desember menjadi Rp. 14.536,-/kg

- **Harga Cabe**



Gambaran gejolak harga cabe di tingkat konsumen dari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Gambaran gejolak Harga Cabe Merah dan Coefisien Variasi (CV) Tingkat Konsumen
Tahun 2022

No.	Bulan	Harga Rata-rata Cabe Merah di tingkat Konsumen
1	Januari	24.086
2	Februari	37.107
3	Maret	41.643
4	April	27.750
5	Mei	36.000
6	Juni	83.893
7	Juli	90.571
8	Agustus	69.471
9	September	62.036
10	Oktober	36.914
11	Nopember	29.643
12	Desember	35.143
Rata-rata		47.854
H-MAX		90.571
H-MIN		24.086
CV		32,74

Sumber : Data diolah, DKP 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Koefisien Variasi Cabe tidak mencapai target yaitu $CV \leq 25\%$. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2022 harga cabe dalam kondisi kurang stabil, yang ditunjukkan dengan nilai CV 32,74 %.

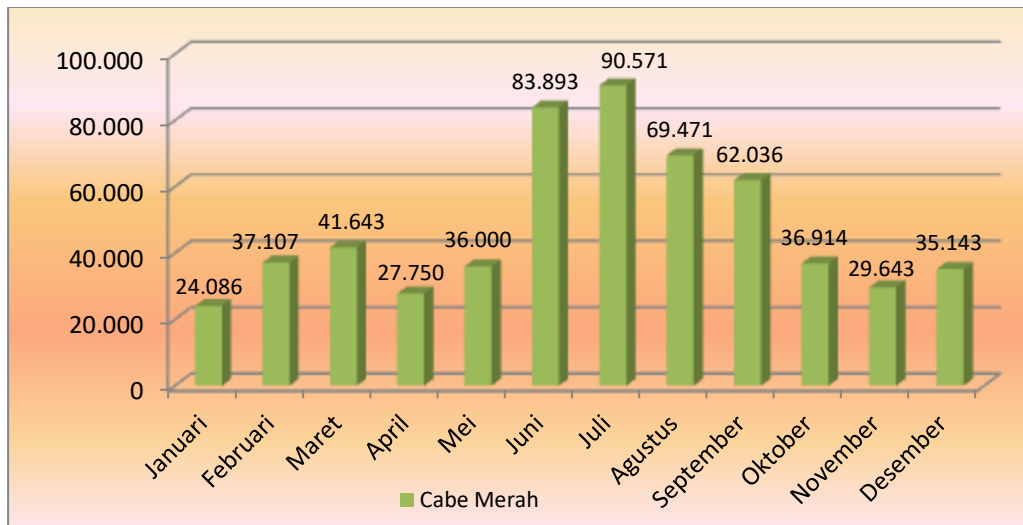
Harga cabe merah sepanjang tahun 2022 mengalami gejolak yang sangat kuat. Mulai bulan Januari , rata-rata harga cabe di tingkat Pedagang grosir berada pada angka Rp. 19.057,-/kg. Harga pada bulan tersebut merupakan harga cabe merah di tingkat produsen yang terendah di sepanjang tahun 2022. Pada bulan Februari harga mengalami kenaikan menjadi Rp. 32.679,- dan naik lagi dibulan Maret menjadi Rp. 37.071,-/kg. Pada bulan April harga cabe ditingkat produsen mengalami penurunan harga yang cukup tinggi menjadi Rp. 23.750,- dan naik lagi dibulan Mei menjadi Rp. 32.043,-/kg.

Pada bulan Juni dan Juli terjadi lonjakan harga yang sangat tinggi yang mencapai harga rata-rata Rp.85.571,- yang merupakan harga tertinggi selama tahun 2022 ini karena bertepatan dengan hari raya Idul Adha.

Begitu pula yang terjadi pada harga cabe di tingkat konsumen, gejolak harga juga terlihat dengan jelas. Pada bulan Januari, rata-rata harga cabe di tingkat konsumen berada pada angka rata-rata Rp. 24.086,-/kg. Yang merupakan harga terendah komoditi cabe di tahun 2022. Pada bulan Februari harga cabe naik menjadi rata-rata Rp. 37.107,-/kg kemudian dibulan Maret naik lagi menjadi Rp. 41.643,-/kg, kemudian harga merosot dibulan April mencapai harga rata-rata Rp. 27.750,-/kg. Pada bulan-bulan berikutnya berangsur-angsur naik sampai pada puncaknya pada bulan Juli harga rata-rata tingkat konsumen mencapai Rp. 90.571,-/kg

Perkembangan harga cabe merah di tingkat konsumen dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Gambar 3.3
Perkembangan Harga Cabe Merah di Tingkat Konsumen



Sumber : Data diolah, DKP 2022

Tingginya harga cabe ini disebabkan oleh :

- a. Faktor cuaca, dimana di daerah produsen cabe baik di dalam daerah Sumatera Barat maupun di luar daerah Sumatera Barat seperti Jawa dan Lampung mengalami bencana alam seperti banjir dan gunung meletus sehingga tanaman cabe banyak mengalami gagal panen.
- b. Meningkatnya biaya produksi dan kelangkaan pupuk serta tingginya harga racun dan pestisida.
- c. Bertepatan dengan hari raya Idul Adha sehingga permintaan terhadap cabe merah meningkat

- **Harga Bawang Merah**



Gambaran gejala harga bawang merah di tingkat konsumen dari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20
Gambaran gejala Harga Bawang Merah dan Coefisien Variasi (CV) Tingkat Konsumen Tahun 2022

No.	Bulan	Harga Rata-rata Bawang Merah di tingkat Konsumen
1	Januari	26.229
2	Februari	34.393
3	Maret	31.036
4	April	38.786
5	Mei	48.343

6	Juni	53.214
7	Juli	47.143
8	Agustus	30.114
9	September	31.786
10	Oktober	32.229
11	Nopember	28.071
12	Desember	25.607
Rata-rata		35.579
H-MAX		53.214
H-MIN		25.607
CV		16,64

Sumber : Data diolah, DKP 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Koefisien Variasi Bawang telah mencapai target yaitu $CV \leq 25\%$. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2022 harga bawang dalam stabil, yang ditunjukkan dengan nilai CV 16,64 %.

Kota Payakumbuh bukan sentra penghasil bawang merah, berangsur-angsur kota Payakumbuh mulai memproduksi bawang merah tapi masih dalam skala kecil dan belum mempengaruhi harga di pasaran. Bawang merah didatangkan oleh pedagang besar, baik dari dalam daerah Sumatera Barat berupa bawang lokal terutama bawang Solok dan pulau Jawa.

Bulan Januari harga bawang merah berada pada rata-rata Rp.26.229,-/kg, pada bulan Februari naik menjadi rata-rata Rp.34.393,-/Kg, pada bulan Maret turun menjadi Rp. 31.036,-/Kg. Kemudian pada bulan-bulan berikutnya kembali melambung tinggi mulai dari harga Rp.38.786,-/Kg dibulan April sampai menjadi Rp.53.214,-/Kg pada bulan Juni yang merupakan harga tertinggi pada tahun 2022.

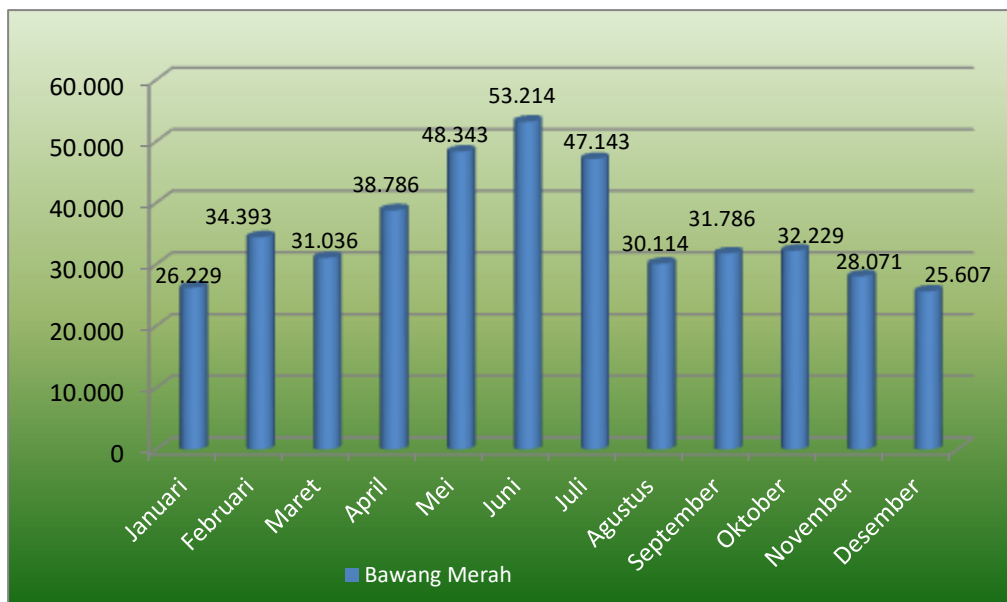
Terjadinya peningkatan harga komoditi bawang merah mulai bulan April hingga bulan Juni karena disebabkan oleh puasa Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri sampai hari raya Idul Adha di bulan Juli.

Harga rata-rata bawang merah mulai mengalami penurunan di bulan Agustus yang semula harga rata-rata Rp. 47.143,-/Kg turun menjadi Rp.30.114,-/kg. Bulan Oktober sempat terjadi kenaikan harga menjadi Rp.32.229,-/Kg namun harga kembali turun dan stabil sampai akhir tahun pada angka rata-rata Rp.25.607,-/Kg.

Fluktuasi harga komoditi bawang merah di disebabkan tingginya permintaan untuk menghadapi puasa Ramadhan, hari raya Idul fitri dan Idul Adha, dan juga disebabkan karena berkurangnya pasokan dari sentra produksi bawang seperti bawang brebes.

Perkembangan harga bawang merah di tingkat konsumen dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

Gambar 3.4
Perkembangan Harga Bawang Merah di Tingkat Konsumen



Sumber : Data diolah, DKP 2022

B. Indikator Kedua Stabilitas Pasokan

Stabilitas pasokan dan harga pangan terutama pangan pokok merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sulitnya memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan karena dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya kemampuan produksi pangan dalam negeri dan pengelolaan stok pangan nasional. Situasi ini diperparah dengan aksi spekulasi baik di daerah produsen yang surplus maupun daerah yang biasanya menjadi negara pengimpor beras.

Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan dari dalam negeri yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjangkau, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produksi pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk dalam negeri tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar dalam negeri akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

Dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5% - 40%. Untuk Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, mengambil patokan Pasokan Pangan dinyatakan stabil jika berada pada posisi stok 77 % atau bila terjadi penurunan stok sebanyak 23%.

Adapun data pasokan/penyediaan pangan yang Tahun 2021-2022 dapat digambarkan pada Tabel berikut :

Tabel 3.21
Data pasokan/Penyediaan Pangan di Kota Payakumbuh Tahun 2021-2022

No.	Kelompok Bahan Pangan	Penyediaan Pangan (Ton) *)					
		Produksi	Perubahan Stok	Masuk	Keluar	Jumlah	
						2022	2021
1	2	3	4	5	6	7	
1	Padi-padian	39.743	39	21	0	39.725	44.957
2	Umbi-umbian/ Makanan Berpati	4.259	0	30	0	4.289	4.886
3	Gula	0	0	2.209	0	2.209	2.209
4	Buah Biji Berminyak	1.942	0	7.042	0	8.984	5.102
5	Buah-buahan	4.916	0	3.917	0	8.833	7.688
6	Sayuran	4.523	0	4.289	0	8.813	8.500
7	Daging	4.581	0	0	0	4.581	4.543
8	Telur	8.531	0	0	0	8.531	8.043
9	Susu	6	0	0	0	6	16
10	Ikan	1.082	0	3.007	0	4.089	3.518
11	Minyak/Lemak	516	0	3.947	0	4.463	4.269
	Jumlah	70.099	39	24.462	0	94.522	93.731

Sumber Data : Hasil Olahan DKP Kota Payakumbuh, 2022

Keterangan : *) Angka Tetap 2021

Dari Tabel 3.21 diatas dapat terlihat bahwa penyediaan / pasokan pangan di Kota Payakumbuh jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan jumlah pasokan, artinya pasokan pangan dinyatakan stabil bahkan melebihi.

Sasaran ketiga ***Meningkatnya kelancaran distribusi pangan*** masuk dalam Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan yaitu, Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota alam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.767.140,- dan realisasi sebesar Rp. 87.434.490,- atau 95,28%.

Serapan anggaran sebesar 95,81% cukup tinggi yang berarti kinerja Dinas pada program ini dinilai sangat baik.

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran ***Meningkatnya kelancaran distribusi pangan*** disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Koordinasi lintas sektor yang semakin baik.
2. Monitoring harga dan pasokan yang dilakukan secara kontiniu.

Faktor Penghambat

Masih ditemukan permasalahan dalam mengatasi gejolak harga cabe seperti ketersediaanya yang tidak mencukupi di saat konsumsi meningkat pada waktu-waktu tertentu. Sehingga harga melonjak naik. Di samping itu ada juga faktor cuaca, luas tanam, dan tingginya biaya produksi yang ikut membuat harga cabe menjadi tinggi.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan***, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.22
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kelancaran Distribusi Pangan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kelancaran Distribusi Pangan	1.1	Stabilitas Harga Beras	%	10	2,95	170,5	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	91.767.140	87.434.490	
		1.2	Stabilitas Harga Cabe	%	25	32,74	69,04					
		1.3	Stabilitas Harga Bawang	%	25	16,64	133,44					
		1.4	Stabilitas Pasokan	%	77	79,00	102,59					
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 4 INDIKATOR							118,89	TOTAL PER SASARAN	91.767.140	87.434.490
TINGKAT EFISIENSI 23,08%												
TINGKAT EFEKTIFITAS 124,08 %												

Sumber : Data diolah, DKP 2022

Dari Tabel 3.22 diatas dapat dijelaskan, tingkat efisiensi berada pada nilai 23,08%, sedangkan tingkat efektifitas 124,08%. Hal ini menunjukkan tingkat efiseinsi yang sangat tinggi dengan tingkat efektifitas sebesar 124,08%. Angka ini mengindikasikan bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki kinerja yang efektif dan efisien karena dengan pencapaian yang melebihi target dapat dilakukan efisinsi sebesar 23,08% dari anggaran yang direncanakan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran ***Meningkatkan Kelancaran Distribusi Pangan*** berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan.
2. Melakukan percepatan realisasi kegiatan.
3. Melakukan monitoring harga dan pasokan secara kontiniu dan up date.

Sasaran 4
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.23
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020		%	Capaian Tahun 2021		%	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2018 terhadap akhir renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1.	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat	Nilai	A	A	100	A	A	100	A	100
	Rata-rata Capaian Kinerja				100			100		100

Sumber : Data diolah, DKP 2022

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilihat dari indikator : Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat.

Capaian kinerja nyata indikator Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat adalah sebesar A dari target A yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikatornya ini menjadi sangat penting karena penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai 88,63 dengan kategori A : memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Akan tetapi untuk penyempurnaan dokumen yang akan datang perlu dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Agar rencana aksi dijadikan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan
2. Agar target kinerja yang diperjanjikan dalam PK dan IKU yang sudah ditetapkan dijadikan dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat sebagai dasar pemberian reward dan punishment
3. Agar evaluasi program dilaksanakan untuk menilai keberhasilan program dan menyajikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
4. Agar pemantauan Rencana Aksi telah memeberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan

5. Agar hasil evaluasi program dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan program dimasa yang akan datang dalam bentuk rekomendasi
6. Agar menyajikan dokumen hasil evaluasi rencana aksi yang telah dilakukan tindak lanjut dalam bentuk langkah nyata

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya*** akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.24
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.1	Nilai	A	A	100	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.721.591.837	2.349.910.810	97,80
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR				100	TOTAL PER SASARAN	2.721.591.837	2.349.910.810	97,80	
TINGKAT EFISIENSI 2,2%											
TINGKAT EFEKTIFITAS 102,24 %											

Sumber : Data diolah, DKP 2022

Dari Tabel 3.25 diatas dapat dijelaskan, tingkat efisiensi berada pada nilai 2,2%, sedangkan tingkat efektifitas 102,24%. Hal ini menunjukkan tingkat efiseinsi yang sangat cukup tinggii dengan tingkat efektifitas sebesar 102,24%. Angka ini mengindikasikan bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki kinerja yang efektif dan efisien karena dengan pencapaian yang melebihi target dapat dilakukan efiseinsi sebesar 2,2% dari anggaran yang direncanakan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Dinas Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.530.514.479,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.142.834.890,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,02%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 Kinerja Dinas Ketahanan Pangan ***Sangat Baik*** .

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Sasaran Renstra Dinas Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Tahun 2022

No.	Sasaran	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan		119.648.110	115.351.350	96,40
		Sub Kegiatan Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan			
		Kegiatan Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	14.999.920	14.627.300	97,52
		Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota	10.255.340	9.865.800	96,02
		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	18.924.730	16.563.100	98,09
2	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman		672.975.512	662.433.390	98,43

		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	647.336.278	639.029.250	98,72
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/kota	25.639.234	23.404.140	91,28
3.	Meningkatnya Kelancaran Distribusi Pangan				
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	91.767.140	87.434.490	95,28
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		2.721.591.837	2.349.910.810	86,34
		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15.667.790	15.323.460	97,80

		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	2.204.509.453	1.855.309.603	84,16
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.232.440	12.195.000	99,69
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.266.630	259.078.653	96,94
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.996.560	70.466.500	96,53
		Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.518.964	37.370.434	99,60
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.400.000	100.167.160	89,92
	Jumlah		3.530.514.479	3.142.834.890	89,02

Sumber : Data diolah, DKP 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada Tahun 2022.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.26
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota
Payakumbuh Tahun 2022

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran 1,	1		115.351.350	96,40
1	Melebihi/Melampau Target	1	100,02%		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
B.	Sasaran 2,	2		662.433.390	98,43
1	Melebihi/Melampau Target	1	100,24%		
2	Sesuai Target	1	100%		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
C.	Sasaran 3,	4		87.434.490	95,28
1	Melebihi/Melampau Target	3	135,51		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	1	69,04		
D.	Sasaran 4	1		2.349.910.810	86,34
1	Melebihi/Melampau Target	-			
2	Sesuai Target	1	100%		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		

Sumber : Data diolah, DKP 2022

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

D. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1.	Juara I Tingkat Provinsi Sumatera Barat,	Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tk. Prov Sumbar Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan kepada KWT SEJAHTERA	2022





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2022. Pembuatan LkjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LkjIP Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,02 % atau interpretasi sangat baik

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100,42 % atau interpretasi sangat baik

Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 118,89 % atau interpretasi sangat baik

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran tersebut, secara umum telah melebihi/sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh TA 2022 sebesar Rp. 3.530.514.479,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.142.834.890,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,02%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 Kinerja Dinas Ketahanan Pangan **Sangat Baik**.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.530.514.479,- telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan adalah 89,02 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH**



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

